

Ekonomi Kaum Muda dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global
FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kaum muda Indonesia tidak mendapatkan kesempatan ekonomi yang memadai. Mereka sangat aktif melakukan inisiasi usaha, dan kerja sosial-politik, tetapi mereka kurang dalam pendampingan dan upaya pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Keterbatasan dana dan kebijakan negara yang kurang memihak kaum muda membuat pemberdayaan ekonomi tidak maksimal pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia. Program dan pendekatan ekonomi bagi kaum muda, khususnya mantan narapidana teroris (napiter) efektif dalam mencegah dan mengatasi terorisme dengan catatan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan kegiatan ekonomi.



Metode:

Wawancara mendalam dan FGD



Responden:

> 100 Responden



Area Riset:

- Lamongan (Jawa Timur)
- Medan (Sumatera Utara)
- Nunukan (Kalimantan Utara)
- Poso (Sulawesi Tengah)
- Solo (Jawa Tengah)



Masa Riset:

Agustus – Januari 2018

Temuan Riset

1 Kaum muda tidak merata dalam mendapatkan kesempatan ekonomi. Beragam tantangan mereka hadapi tergantung pada demografi, ketersediaan pekerjaan, dan keamanan lingkungan. Daerah perbatasan dan kepulauan seperti Nunukan memiliki masalah sosio-ekonomi yang berdampak pada kaum muda.

“Mereka lebih memilih bekerja di perkebunan sawit di Sabah meski dilakukan secara ilegal. Kaum muda di daerah perbatasan seperti di Nunukan, Kalimantan utara lebih memilih kembali menjadi pekerja ilegal di Sabah meski mereka telah dilatih kewirausahaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mereka tertangkap dan dideportasi ke Indonesia. Langkanya ketersediaan lapangan kerja menjadi salah satu penyebabnya”

(wawancara dengan Disnakertrans Nunukan, 11 September 2017).

Di samping itu, mereka memandang peningkatan keterampilan ekonomi bagi kaum muda memiliki peran strategis dalam

membendung mereka untuk memilih bekerja di Malaysia atau menjadi kurir narkoba.

Sebab harga kebutuhan hidup di Malaysia lebih murah, banyak masyarakat lokal yang bermigrasi ke Malaysia untuk menjadi TKI ilegal. Bahkan menjadi calo TKI dapat dikatakan sudah menjadi mata pencaharian umum bagi warga, di samping menjadi nelayan, buruh kapal, atau bekerja di pelabuhan dan pemberdayaan rumput laut. Sumber daya alam yang kaya di alam Nunukan yakni kayu justru dikuasai oleh swasta secara besar-besaran.

Masalah kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi di daerah perbatasan memicu tindak kriminalitas, paling tidak tindak pidana umum. Kaum muda yang terlibat dalam tindak pidana umum ini yang kemudian menjadi target empuk bagi kelompok teroris. Khairul Gazali misalnya, membeberkan bahwa sewaktu menjalankan aksi perampokan CIMB Niaga di Medan pada 18 Agustus 2010, dengan mudahnya ia merekrut kaum muda yang menganggur semisal preman, kriminalis, dan mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara.

2 Kondisi perekonomian yang memprihatinkan tersebut juga mendorong kaum muda menjadi terjerumus ke dalam bisnis narkoba.

“Kaum muda terlibat dalam bisnis narkoba karena faktor ekonomi. Narkoba memang menggiurkan, kedua karena faktor perbatasan. Dulu kan TKI banyak lewat sini, jadi sekarang tidak lagi. Karena sepi itu mereka beralih menjadi kurir narkoba. 468 dari 702 penghuni Lapas Nunukan adalah kasus narkoba”

(Wawancara dengan Kepala Lapas Nunukan, Agus Bahrudin, Lapas Nunukan, 29 Agustus 2017).

Grafik 1 menunjukkan dominannya narkoba sebagai problem kaum muda di Nunukan. 15 dari 20 responden yang diwawancarai dalam studi ini menyebut narkoba menjadi masalah utama selain *illegal smuggling* dari Nunukan ke Tawau, Malaysia.

3 Kaum muda Indonesia tidak mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja baik pada tingkat nasional maupun regional. Akibatnya, ditambah dengan rendahnya lapangan kerja, peluang dan kesempatan kerja bagi pemuda termasuk pula mantan napiter semakin sempit.

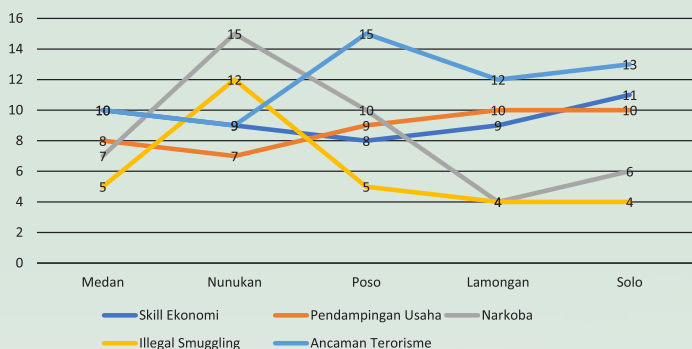
“Keterbatasan modal dan pendanaan usaha juga menjadi perhatian Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan. Hal ini menyulitkan kaum muda untuk meningkatkan usaha agar lebih kompetitif.”

(Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Medan, 26 Agustus 2017).

“Karena sulitnya pekerjaan, banyak teman-teman punya rencana mau bikin rusuh lagi di kota Poso biar lumpuh ekonomi. Tapi kita sudah berpikir dewasa, lebih baik kita kelaparan daripada harus rusuh-rusuh. Karena takutnya dimanfaatkan saja sama orang-orang yang punya kepentingan.”

(Upik dan Irwan, mantan napiter, wawancara di Poso, 5 September 2017).

Grafik 1. Masalah Sosio-ekonomi Kaum Muda dan Ancaman Keamanan 2017



Sumber: Riset PSTPG 2018

4 Masih adanya keterbatasan kerjasama *multi-stakeholder* dalam menangani permasalahan ekonomi kaum muda, terutama keterkaitannya dengan isu terorisme. Selama ini BNPT cenderung berjalan sendiri dan tidak banyak

melibatkan elemen lokal dalam pemberdayaan ekonomi bagi mantan napiter.

“Harusnya ada evaluasi, kalau yang sudah berjalan ada beberapa kali turun bantuan tapi lemah dimonitoring. Harus ada pendamping, paling tidak setelah dapat bantuan kan ada data untuk apa dan untuk siapa. Jadi ada evaluasi dan monitoring.”

(Arifuddin Lako alias Brur (32), mantan napiter Poso, wawancara di Poso, 29 Agustus 2017).

“Kerjasama kaum muda lintas etnis dan agama akan menciptakan harmoni dan perdamaian yang lebih permanen di Poso. Komunitas Rumah Katu diciptakan untuk memperkokoh kerjasama anak muda, demi syiar Poso yang damai”

(Wawancara dengan Brur di Poso, 22 Januari 2018).

Pemerintah daerah belum menyadari sepenuhnya bahwa tanggungjawab penanganan terorisme juga membutuhkan kebijakan daerah.

Khairul Ghazali menanggapi Pemda Kota Medan yang mengaku tidak mengetahui adanya Pesantren Al Hidayah sebagai pusat Pendidikan rehabilitasi bagi siswa. Ghazali menyatakan:

“Bohong kalau mereka tidak tahu kondisi disini, kalau mereka bilang tidak tahu mereka menutup diri itu. Gubernurnya sudah tiga kali kesini, bupati sudah dua kali kesini, wali kota sekali. Dari mana mereka mengatakan tidak tahu? Mereka hanya menganggap sepele, nanti kalau sudah ada kejadian baru kelimpungan”

(Khairul Ghazali, mantan napiter dan Pengasuh Pesantren Al Hidayah Sumatra Utara, wawancara di Medan, 11 Oktober 2017).

5 Kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina menjadi prioritas dalam menjaga lintas batas negara, melindungi kaum muda dan warga negara. Terutama Malaysia, kerjasama dan komunikasi antar Malaysia dan Indonesia tentu menjadi isu bilateral yang perlu diatasi bersama. Patroli bersama penting dilakukan untuk mengurangi masuknya warga asing ke wilayah Asia Tenggara untuk bergabung dengan kelompok Abu Sayaf dan ISIS di kawasan ASEAN.

“Kaum muda menggunakan jalur tikus untuk peredaran narkoba, serta jalur keluar masuknya teroris dari Indonesia ke Mindanao melewati Nunukan dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Tiga warga Nunukan tertangkap di perbatasan ketika akan menyeberang ke Filipina. Selanjutnya, 2 WNI yang terlibat di Marawi juga menggunakan jalur masuk Nunukan”

(Wawancara dengan Bringallo, KODIM 09/11 Nunukan, wawancara 4 September 2017).

“Pemerintah Malaysia hanya peduli dengan keamanan wilayahnya. Gembong dan kurir narkoba dibiarkan dengan syarat barang diedarkan ke luar Malaysia”

(Wawancara dengan Kesbangpol Nunukan, 29 Agustus 2017).



Enhancing the Role of Religious Education in
Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>